

**PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DAN PERUBAHAN SISA LEBIH PERHITUNGAN  
ANGGARAN TERHADAP PERUBAHAN BELANJA MODAL**

TRI PUJI LESTARI  
1500012325

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA**

E-mail: tripujilestari24@gmail.com

**ABSTRAK**

The objective of this study is to determine the effect of rebudgeting in local revenue (PAD) and rebudgeting in time over budget calculation (SiLPA) to rebudgeting in capital expenditure (BM) on districts/cities in Central Java in 2015-2017 period. The population in this study was a report of the rebudgeting in revenue and expenditure (P-APBD) in the regency/city of Central Java in the period 2015-2017. The study in sampling using the Purposive sampling method and obtaining a total of 48 samples. Research Data is obtained from the official website of the local government. The analysis method used in this research is multiple linear regression with the previously tested with the classical assumption test.

The results of this research show that the rebudgeting in local revenue (PAD) and rebudgeting in time over budget calculation (SiLPA) simultaneously affect the rebudgeting in capital expenditure (BM). As for a partial, rebudgeting in local revenue (PAD) affects the change rebudgeting in capital expenditure (BM) and the rebudgeting in time over budget calculation (SiLPA) affect the rebudgeting in capital expenditure(BM).

***Keywords:*** *Rebudgeting Ini Local Revenue (PAD), Rebudgeting In Time Over Calculation (SiLPA, Rebudgeting In Capital Expenditure (BM)*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri. Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, mengelola sumber daya yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (Maulina dkk, 2017). Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Setelah APBD dilaksanakan, selama periode berjalan akan terjadi perubahan-perubahan asumsi, sehingga APBD harus mengalami penyesuaian. Penyesuaian APBD dilakukan dengan merubah jumlah angka dalam pendanaan, belanja dan pembiayaan.(Amran dkk, 2015)

Perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebabkan oleh beberapa faktor, sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 faktor tersebut yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Perubahan APBD merupakan proses untuk menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan rencana keuangannya seiring dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan tersebut dapat mengakibatkan peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran namun juga dapat menurunkan penerimaan maupun pengeluaran (Abdullah, 2013).

Salah satu komponen perubahan APBD adalah perubahan anggaran belanja modal. Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari

12 bulan. Belanja modal sangat penting karena berhubungan dengan pelayanan kepada publik untuk pemerataan pembangunan di daerah.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian penting dalam perubahan anggaran daerah, khususnya pada belanja modal. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan alokasi belanja adalah perubahan karena adanya varian (senjangan) SiLPA, perubahan karena adanya pergeseran anggaran, perubahan karena adanya perubahan dalam pendapatan (Abdullah, 2013).

Perubahan anggaran dapat disebabkan oleh perubahan pendapatan. Komponen pendapatan yang ada dalam APBD salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah ( Halim, 2002). Perubahan anggaran dapat pula disebabkan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 SiLPA mencakup pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, belanja kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasikan dan sisa dana dari kegiatan lanjutan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi saat asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus dilakukan perubahan/revisi (Abdullah, 2013)

Objek dalam penelitian ini adalah laporan perubahan APBD pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari dua puluh sembilan kabupaten dan enam kota dengan periode penelitian 2015-2017. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak kedua di Indonesia. Perubahan APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah umumnya digunakan untuk pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan anggaran Rp 50 miliar untuk proyek infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran Rp 15 miliar untuk empat proyek besar dalam APBD perubahan yang digunakan untuk pembebasan lahan pembangunan, jalur Lingkar Patikraja Underpass Pekuncen, akses jalan Jembatan Linggamas dan akses jalan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh.

## **LANDASAN TEORI**

### **Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan guna mewujudkan otonomi daerah. Penyelenggaran otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pada daerah tersebut serta sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

### **Belanja Modal**

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Niode dkk (2016) menyebutkan bahwa adanya perubahan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat menambah investasi pemerintah daerah, sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulina dkk (2017) menemukan bahwa perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja modal

### **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**

Menurut permendagri No 33 Tahun 2006, Sisa Lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah, pelampauan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terealisasi dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA dapat digunakan untuk mendanai aktivitas yang masih belum terealisasi ditahun anggaran sebelumnya maupun aktivitas sebelumnya yang belum masuk dalam anggaran APBD (Abdullah,2015). Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulina dkk (2017) menemukan bahwa perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap perubahan belanja modal

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan perubahan APBD pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan perubahan APBD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan sebagai sampel adalah:

- a) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasi laporan perubahan APBD periode 2015-2017
- b) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki rincian perubahan Belanja Modal, perubahan PAD, Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran periode 2015-2017.

### **Jenis Data Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini yaitu laporan perubahan APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan bersumber dari *website* resmi pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data perubahan PAD, perubahan SiLPA dan perubahan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data laporan perubahan APBD.

### **Definisi Operasional**

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perubahan belanja modal. Variabel ini diukur dengan cara menghitung selisih antara anggaran belanja modal sebelum perubahan APBD dengan anggaran belanja modal setelah perubahan APBD

#### **Variabel Independen**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran. Perubahan pendapatan asli daerah diukur dengan cara menghitung selisih antara anggaran pendapatan asli daerah sebelum perubahan APBD dengan anggaran pendapatan asli daerah setelah perubahan APBD dan sisa lebih perhitungan anggaran diukur dengan

menghitung selisih antara sisa lebih perhitungan anggaran sebelum perubahan APBD dengan sisa lebih perhitungan anggaran setelah perubahan APBD

### **Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi linier berganda. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis dinyatakan dengan model sebagai berikut;

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan

Y: Perubahan Belanja Modal

$\alpha$  : Bilangan Konstanta

$\beta$  : Koefisien Regresi

$X_1$  ; Perubahan Pendapatan Asli Daerah

$X_2$  : Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

$\varepsilon$ : *error*

### **HASIL ANALISIS**

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Perubahan APBD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017. Data laporan perubahan APBD diperoleh melalui *website* resmi pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling* data yang dapat diperoleh sebanyak 48 data.

NO	Keterangan	Jumlah
1	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
2	Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mempublikasi laporan perubahan APBD secara rutin selama tahun anggaran 2015-2017	(18)
3	Pemerintah Kabupaten/kota yang tidak memiliki rincinan perubahan PAD, perubahan SiLPA, perubahan belanja modal dalam laporan perubahan APBD tahun anggaran 2015-2017	(1)
	Jumlah sampel	16
	Tahun (n)	3
	Total sampel	48

## Uji Hipotesis

### Regresi Linier Berganda

Dalam pengambilan keputusan, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Variabel	B	Signifikansi	<i>Alpha</i>	Keputusan
Perubahan pendapatan asli daerah	0,634	0,038	0,05	H1 didukung
Perubahan sisa lebih perhitungan anggaran	0,382	0,001	0,05	H2 didukung
Variabel dependen = Perubahan belanja modal				
Constanta = 23.826.145.661,105				
F statistik = 10.940				
Signifikansi = .000 <sup>b</sup>				
R Square = 0,327				
Adjusted R Square = 0.297				



Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disusun sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = 23.826.145.661,105 + 0,634X_1 + 0,382X_2 + \varepsilon$$

### **Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil penelitian nilai R Square sebesar 0,327 artinya sebesar 32,7% perubahan belanja modal dipengaruhi oleh perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran sedangkan sisanya yaitu 67,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi dalam penelitian ini.

### **Uji Simultan (Uji-F)**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , oleh karena itu variabel perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap perubahan belanja modal.

### **Uji Parsial (Uji-t)**

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, maka penjelasan atas keempat hipotesis pada studi ini dapat dijabarkan di bawah ini

H1: Perubahan pendapatan asli daerah terhadap perubahan belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan pendapatan asli daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan *alpha* sebesar 0,05 menunjukkan nilai yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> terdukung

H2: Perubahan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap perubahan belanja modal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan *alpha* sebesar 0,05 menunjukkan nilai yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> terdukung

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh perubahan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Dengan demikian, hasil tersebut mendukung hipotesis 1 yang menyatakan bahwa perubahan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah (Halim,2002). Perubahan pendapatan asli daerah mempunyai keterkaitan dengan perubahan belanja modal bahwa perubahan yang terjadi dalam anggaran pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perubahan belanja modal. Semakin meningkat perubahan pendapatan asli daerah maka semakin meningkat pula perubahan belanja modal yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan infrastruktur pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulina dkk (2017) yang menyatakan bahwa perubahan asli daerah berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

### **Pengaruh Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap perubahan belanja modal. Dengan demikian, hasil tersebut mendukung hipotesis 2 yang menyatakan bahwa perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap perubahan belanja modal.

Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah karena sisa lebih perhitungan anggaran akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran (Balai Litbang NTT, 2008). SiLPA dapat digunakan untuk mendanai aktivitas yang masih belum terealisasikan ditahun anggaran

sebelumnya maupun aktivitas sebelumnya yang belum masuk dalam anggaran APBD (Abdullah,2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulina dkk (2017) yang menyatakan bahwa perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap perubahan belanja modal

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Perubahan Belanja Modal maka dapat disimpulkan bahwa perubahan pendapatan asli daerah dan perubahan sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap Perubahan Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2017

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada tahun observasi banyak kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang tidak mempublikasikan Laporan Perubahan APBD pada *website* pemerintah kabupaten/kota tersebut sehingga mempengaruhi data penelitian. Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah rentang waktu periode penelitian dan mempertimbangkan perluasan objek penelitian

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Syukriy.2013. Perubahan APBD [Online]. Didapatkan: <<https://syukriy.wordpress.com/2013/04/22/Perubahan-Apbd/>. [15> November 2018]

Abdullah, Syukriy.2013. Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja [Online]. Didapatkan:<<https://syukriy.wordpress.com/2013/12/16/pengaruh-silpa-terhadap-belanja/> [15>November 2018]

Amran, Darwanis &Syukriy Abdullah (2015) *Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, Dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial*. Jurnal Magister Akuntansi, 1-10

- Balitbang Provinsi NTT.2008. Analisis Tentang Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal litbang NTT*, IV-03
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul.(2002).*Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta: Salemba Empat
- Lupiyoadi, Rambat.,& Ikhsan, Ridho Bramulya.(2015).*Praktikum Metode Riset Bisnis*.Jakarta:Saleba Empat
- Maulina, Isra., Nardisyah.,& Darwanis(2017) *Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perubahan Belanja Modal*. *Jurnal Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 191-196
- Niode, Audie O.,Antunius Y Luntungan.,& Chindy Febri Rori.(2016).*Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013*.*Jurnal Berkala Efisiensi*,16,243-254
- Palupi,Filma Ayu Dian.,& Sulardi.(2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal*.*Jurnal Akuntansi*,16,40-51
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- Sugiyono.(2010).*Metode Penelitian Bisnis*.Bandung:CV Alfabeta
- Syaiful.2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan [Online]. Didapatkan: <<http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art16.pdf> [20>April 2019]
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara  
Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah